

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kejatuhan Orba, umat Islam memanfaatkan momentum euphoria reformasi untuk menyusun kembali format penegakan syariat Islam dijalar politk. Diantaranya mencuat kembali cita-cita Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan mendirikan partai-partai Islam dan berbagai orientasi, visi,dan misi perjuangannya.¹

Kondisi transisi demokrasi Indonesia pada saat kepemimpinan Soeharto tengah berada dalam berbagai krisis dan isu primordialisme yang mencuat, menjadikan Gus Dur sebagai sosok pemimpin yang dibutuhkan ditengah rakyat Indonesia yang multikultural. Gus Dur adalah simbol toleransi, merupakan sosok pembela minoritas, seperti etnis Tionghoa dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak di

¹ Suron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana2013), h.

untungkan pada pemerintahan masa Orde Baru. Gus Dur adalah salah satu tokoh sentral yang memperjuangkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural. Gus Dur dikenal sebagai seorang pemuka Islam yang memiliki pemikiran liberal, serta perjuangannya agar pluralisme sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia tentang nasionalisme dan mengaplikasikannya berdasarkan hukum Islam.²

Pada tahun 1991, Gus Dur membentuk Fordem (Forum Demokrasi) untuk membela pluralisme dan demokrasi Indonesia. Forum demokrasi merupakan sebuah wadah bagi masyarakat Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya. Gus Dur menjadi ketua dan juru bicara forum demokrasi ini, ketenaran dan pengaruh Gus Dur membuat organisasi ini mendapatkan kepercayaan publik, forum demokrasi ini didirikan untuk memberikan kekuatan penyeimbang dan menghambat laju isu sekretarianisme atau politik aliran di Indonesia. Gus Dur menginginkan demokrasi berjalan sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku.

Pada saat menjabat sebagai presiden, Gus Dur melakukan tindakan dan kebijakan yaitu agar TAP MPRS No. XXV yang berisi

² Greg Barton, *Memahami Abdurrahman Wahid, Dalam Pengantar Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKis, 2000), h. xxii

ajaran larangan Komunisme, dan Leninisme di Indonesia dicabut, alasannya karena bertentangan dengan HAM di Indonesia dan tidak sesuai dengan pengamalan UUD 1945. Walaupun usulan dicabutnya TAP MPRS tidak berhasil, tetapi upaya tersebut mampu membuka pemikiran masyarakat untuk menegakan demokrasi seutuhnya tanpa diskriminasi. Selain itu, dalam upaya mengatasi masalah disintegras seperti gerakan separatis di Papua (Organisasi Papua Merdeka), dan di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), Gus Dur memilih menyelesaikan melalui jalan dialog, dan menolak kebijakan militerisme. Jalan dialog dipilih Gus Dur untuk mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi pada rezim sebelumnya.

Pada tahun 2001 Gus Dur melakukan kebijakan yaitu menjadikan Imlek sebagai hari libur Nasional, sebagaimana dihari raya lain di Indonesia. Gus Dur juga menetapkan Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Gus dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat, dan menggantinya dengan keputusan presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada 17 Januari 2000. Kebijakan yang dilakukan Gus Dur terbukti mampu menyelamatkan masyarakat Tionghoa dari diskriminasi di era Orde Baru. Selama masa pemerintahan Soeharto masyarakat Tionghoa tidak mendapatkan

haknya seperti merayakan Imlek secara terbuka. Tindakan Gus Dur terhadap rakyat Tionghoa merupakan sikap inklusif Gus Dur yang mampu menghargai perbedaan di Indonesia, salah satunya perbedaan akan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, karena pemikiran dan tindakan Gus Dur membela masyarakat Tionghoa, Gus Dur diberi gelar sebagai bapak Tionghoa Indonesia.³

Selain dikenal pluralisme, Gus Dur juga merupakan tokoh penting yang terus berusaha memperkokoh Nasionalisme Indonesia, seperti tampak dalam tindakan-tindakannya terhadap bangsa Indonesia. Pemikiran dan tindakanya menjadi teladan bagi generasi muda dan sangat cocok untuk diajarkan dalam pembelajaran sejarah. Sikap Nasionalis serta kegigihan Gus Dur dalam menjaga keseimbangan Negara dan bangsa patut diteladani. Gus Dur merangkul semua nilai-nilai universal, yang dibencinya hanya kelicikan. Gus Dur seorang muslim yang hatinya penuh rasa kemanusiaan dan seorang nasionalis Indonesia tulen.⁴

³ Leo Suryadinata, "Kebijakan Negara Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?", *Antropologi Indonesia*, (2003), h.7

⁴ Room Franz Magnis Suseno, "Gus Dur dan Semangat Kebangsaan", *KampungGusdurian*, (November 2013).<http://www.gusdurian.net/id/article/opini/Gus-Dur;Semangat-Kebangsaan/>, (diakses pada 15 Desember 2017 pkl. 20.00).

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang peneliti akan kaji adalah masalah relasi Islam dan demokrasi di Indonesia pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

1. Bagaimana pemikiran K.H Abdurrahman Wahid tentang demokrasi ?
2. Pemikiran Gus Dur tentang hubungan Islam dengan demokrasi di Indonesia ?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi penelitian ini pada Relasi Islam dan Demokrasi di Indonesia Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiranKH Abdurrahman Wahid tentang demokrasi?
2. Bagaimana relasi Islam dan demokrasi di Indonesiadalam pemikiran KH Abdurrahman Wahid?

E. Tujuan penelitian .

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran KH Abdurrahman Wahid tentang demokrasi.
2. Untuk mengetahui relasi Islam dan demokrasi di Indonesia dalam pemikiran KH Abdurrahman Wahid.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang akademik mengenai relasi Islam dan demokrasi di Indonesia pemikiran KH. Abdurrahman Wahid, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya mahasiswa. Serta dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi yang berkaitan dengan relasi Islam dan demokrasi di Indonesia serta

dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat paham tentang relasi Islam dan demokrasi di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dasar atau acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai peneliti sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan sebagai tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu:

Nama	Judul Sekripsi	Pembahasan	Perbandingan
Arif Rahman NIM: 09370034	Konsep Budaya dan Demokrasi Dalam Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (gus Dur),	Pada sekripsi ini membahas tentang budaya dan demokrasi. Persamaan nya adalah membahas tentang demokrasi dan Gus Dur tetapi lebih	Perbedaannya adalah tidak membahas tentang relasi Islam dengan demokrasi di Indonesia perbedaan disini. Sangat jelas

		menjelaskan tentang budaya demokrasi.	dengan diatas maka dari itu penulis mencantumkan kedalam sekripsi ini untuk penelitian relevan
Muhammad Daurul Fachri, NIM: 061200022	Peran Politik Gus Dur Terhadap Perkembangan Hkum Islan di Indonesia,	Pada sekripsi ini membahas tentang politik Gus Dur terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Persamaannya adalah membahas tentang Gus Dur dalam pandangan politik Islam di Indonesia.	Pada sekripsi ini membahas tentang politik Gus Dur terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Persamaannya adalah membahas tentang Gus Dur dalam pandangan politik Islam di Indonesia. Adapun perbedaannya

			adalah tidak membahas tentang relasi Islam dan demokrasi di Indonesia maka dari itu penulis membahasnya.
--	--	--	--

Dalam penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang penulis teliti, persamaan skripsi tersebut sama-sama menjelaskan tentang Demokrasi, perbedaan skripsi yang menjadi peneliti terdahulu yang relevan penulis lebih meneliti tentang Relasi Islam dan Demokrasi di Indonesia Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

H. Kerangka pemikiran

Sikap politik Gus Dur yang lentur, menjadikan kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh siapapun. Gus Dur tidak arogan untuk bertemu banyak orang, menyimak dan menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk orang atau kekuatan politik yang pernah menjadi rival dengannya

Gus Dur adalah pencipta wacana. Ia diuntungkan karena mewakili basis masa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Sebelum resmi terjun dalam dunia politik praktis, baik selama menjadi presiden ataupun setelahnya dengan wacana-wacana sekuler, seperti pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil tidak membuat hidupnya merasa terbebani.⁵

Dengan majunya spesialisasi dalam dunia ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam profesi kehidupan maka potret atau konsep tentang realitas manusia semakin terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil sehingga keutuhan sosok manusia sulit dihadirkan secara penuh, politik Gus Dur memiliki metode dan tujuan yang berbeda. Setiap pemikiran Gus Dur meskipun obyek materialnya sama-sama politik, akan melahirkan kesimpulan yang berbeda.

Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan ini adalah teori konflik politik dari pemikiran *Ralf Dahrendorf* yang menjelaskan bahwa konflik politik yang terjadi bukan pada siapa diuntungkan tetapi telah bergeser kepada siapa yang lebih berwenang atau berkuasa. Konflik menurut *Ralf Dahrendorf* lebih didasarkan pada distribusi kewenangan yang dirasakan tidak merata sehingga saat

⁵ Penerbit Buku Kompas, *Gus Dur Santri Par Excelent*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010),h. 153

institusi dapat berkonflik dengan institusi lainya dalam struktur institusi yang lebih besar.

Teori manajemen konflik interaksionis digunakan pula untuk menjelaskan bagaimana cara-cara yang dilakukan Gus Dur dalam menyelesaikan politik Islamnya sebagai presiden, diselesaikan dengan metode konforontasi atau kompromi. Untuk kasus ini, manajemen politik yang dilakukan oleh Gus Dur membawa keterbukan di segala bidang, keterbukaan pers, demokratis kedaulatan hukum, penegakan hukum dan tatanan pengelolaan pemerintahan yang ditempuh adalah melalui melakukan konforontasi di segala elemen- elemen yang dipengaruhi oleh pemikiran yang tidak pernah konsisten dengan pemecahan terpadu di satu sisi lain berupaya melakukan komfromi terhadap pemimpin partai, tokoh politik, tokoh mahasiswa, dan tokoh-tokoh lainya.

Bangkit dari dalam salah satu warisan berharga dari Gus Dur ialah. Titik berangkat Gus Dur bermula dari isu-isu pembangunan pesantren sebagai bagian dari subkultur masyarakat. Ketika pertamakali Gus Dur memasarkan pesantren di dunia Internasional, ada yang lebih berharga ketimbang mengakui pesantren sebagai salah satu lembaga independen umat muslin yang asli tradisi nusantara.

Gus Dur memandang pemribumian ialah keperluan agar tradisi tidak tercerabut. Bagi Gus Dur, ketika ilmu-ilmu sosial dari barat diimpor besar-besaran, Gus Dur malahan perlu sekali untuk melihat pesantren sebagai labolatorium hidup bagi masyarakat, di hadapan tradisi besar keilmuan dunia.

Gus Dur tidak imperior, belau sangat percaya diri bahwa dari konteks kelokalaan bisa muncul kretifitas yang tak berhenti sampai disitu. Kaidah ulama klasik yang hidup dipesantren, melahirkan hal lama yang baik dan mengambil hal yang baru lebih baik. sesungguhnya dipegang oleh Gus Dur itu dikarenakan ia tak gampang ketika harus berbicara tentang demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.⁶

Aspek multikulturalisme yang dengan gigih dihayati oleh Gus Dur adalah pengakuan akan adanya pluralitas atau perbedaan cara hidup, baik secara agama, budaya, politik, maupun jenis klamin. Gus Dur mengakui kelompok lain dalam perbedaannnya dan mendorongkelompok lain menjadi dirinya sendiri, semakin Gus Dur menjadi dirinya sendiri dalam Identitas kultural dan jati dirinya. Semakin Gus Dur mendorong umat dari agam lain menghayati secara

⁶Muhammad Zakki, *Gus Dur Presiden Republik Akhirat*, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2010), h.30

murni dan konsekuen, beliau justru semakin menjadi seorang muslim yang baik dan tulus.

Proyek besar yang ditinggalkan Gus Dur yang sekaligus menjadi tantangan kita bersama adalah kita masih berbicara tentang multikulturalisme pada tingkat wacana. Kita belum benar-benar menghayati dan melaksanakannya secara konsekuen sebagaimana Gus Dur. Hal itu, karena kita terhambat oleh ketakutan diri kita sendiri.

I. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini lebih memuat kepada kejelasan peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa kajian, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau tinjauan pustaka ini maksudnya untuk merujuk suatu buku atau literatur yang

setidak-tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas tersebut.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data yakni sumber primer dan sumber sekunder, adapun rincian masing-masing sumber yaitu:

- a. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti relasi Islam dan demokrasi di Indonesia, pemikiran Gus Dur tentang relasi Islam dan demokrasi.
- b. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder bisa berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan teknik induktif. Induktif adalah

⁷ Wahyu Wiguna, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, (ed), Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (Jakarta: TP, 2007), h. 5-6

pengambilan kesimpulan pernyataan dari fakta atau data kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2017.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang Biografi Politik KH. Abdurrahman Wahid, meliputi: Riwayat Hidup, Karya-karya KH. Abdurrahman Wahid, penghargaan KH. Abdurrahman Wahid dan latar belakang sosial dan politik serta pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang demokrasi, meliputi: demokrasi dan hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme, demokrasi pendidikan dan pribumisasi Islam.

Bab keempat merupakan bab yang membahas analisis tentang Kajian Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid relasi Islam dan demokrasi di Indonesia, meliputi: konsep demokrasi menurut KH. Abdurrahman Wahid dan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan demokrasi di Indonesia.

Bab kelima yang membahas penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.